BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thomas Robert Malthus adalah seseorang yang memberikan perhatikan khusus pada teori pertumbuhan yang sangat sistematis dan perhatiannya kepada jelas. Malthus menarik "perkembangan kesejahteraan" negara, sehingga pembangunan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kesejahteraan negara. Kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara itu bergantung kepada kualitas produk yang telah dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan juga pada nilai produk tersebut (Matondang, 2016). Gagasan Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini yang menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya di tingkat nasional (Purwaningsih, 2008).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama dari penduduknya, sehingga sebagian besar lahan diwilayahnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja disektor pertanian itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Petani menjadi sektor yang dapat diandalkan sebab berkonstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat serta dapat meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia untuk dikonsumsi setiap hari agar hidupnya sehat, produktif, aktif secara

berkelanjutan maka untuk dapat tercapainya suatu ketahanan pangan harus tetap terjaga (Saragih et al., 2021). Pangan B2SA atau yang berarti Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan serta tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan (Novita & Fitriyaningsih, 2021). Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No. 40 Tahun 2021 Pasal 1 Ketahanan Pangan merupakan prasyarat terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon ini terletak dibagian timur dan merupakan bagian perbatasan pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon dilihat dari segi pertanian adalah salah satu daerah yang menghasilkan padi di daerah pesisir utara. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama yaitu daerah daratan rendah umumnya terletak disepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangenan, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108°40' - 108°48' Bujur Timur dan 6°30' - 7°00' Lintang Selatan.

Ketahanan pangan merupakan prasyarat terpenuhinya ketersediaan pangan keluarga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman serta terjangkau. Pangan ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun

tidak, yang dimaksudkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (pangan). Karena mengingat Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan merupakan tantangan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan keragaman sumber daya alam, sosial dan budaya yang beragam, yang harus dipandang sebagai karantina ilahi untuk menciptakan ketahanan pangan. Upaya dari pencapaian ketahanan pangan nasional harus bergantung pada sumber pangan lokal yang memiliki keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan (Aisyah. i.s., 2020).

Oleh karena itu ketahanan pangan tercermin dari ketersediaan pangan yang sebenarnya di masyarakat, maka harus diketahui secara jelas oleh masyarakat mengenai ketersediaan pangan tersebut. Penyediaan pangan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mencapai penyediaan pangan tersebut diperlukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan serta mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Sumber pasokan penyediaan pangan diwujudkan dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pendapatan pangan. (Amang, Subowo, 1999)

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering di identikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Beras sejak dulu selalu ditumpangi berbagai kepentingan, misalnya penggunaannya dijadikan sebagai komoditas politik. Pada jaman Belanda, harga beras dijaga tetap murah sehingga upah buruh perkebunan yang mencari nafkah dibayar dengan beras juga menjadi murah. Dengan demikian beras mensubsidi perkebunan, sebagaimana pertanian mensubsidi industri selama ini. Dengan segala kelemahan tersebut, wajar jika beras Indonesia kalah bersaing dengan beras dunia dan akibatnya karena sebagai komoditas politik Indonesia juga menjadi lemah dihadapan negara-negara lain yang sudah surplus pangan. (Muljawan, 2011)

Sebagai bahan pangan utama, beras menjadi salah satu produk pertanian utama dan menjadikan pertanian sebagai sektor penting dalam perekonomian di Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor yang sangat strategis sebagai garda terdepan ketahanan pangan Indonesia. Tantangan terbesar sektor pertanian berasal dari tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dengan luas lahan pertanian pangan.

Kebijakan beras di Indonesia meliputi kebijakan produksi, distribusi, impor dan pengendalian harga dalam negeri (domestik) dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) telah terjadi peningkatan produksi padi, meskipun cenderung berfluktuasi. Sebagian besar kebijakan perberasan yang telah dikeluarkan pemerintah sebenarnya memiliki tujuan akhir untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme perdagangan internasional dan berbagai perubahan lingkungan internal maupun eksternal Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan baik kebijakan produksi, impor, distribusi maupun pengendalian harga yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi melalui sebuah mekanisme perdagangan (Dewi, 2019).

Komoditas beras merupakan kebutuhan pangan paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Sehingga konsumsi beras tergolong berlebih dibandingkan dengan sumber pangan lainnya. Karena beras sangat penting bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dari dalam negeri. Upaya tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat Indonesia mengingat jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan sebaran penduduk yang luas dengan cakupan geografis yang tersebar. Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduknya. Sehingga Indonesia dapat menjaga ketahanan pangannya. Produksi Padi di Indonesia tersaji dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2019-2021

1	Tahun	Produksi Padi (Ton GKG)
	2019	54,60 juta
	2020	54,65 juta
	2021	54,42 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2019-2021 produksi padi di Indonesia mengalami naik turun. Tahun 2020 menempati posisi tertinggi dalam produksi padi di Indonesia di bandingkan dengan tahun 2019 dan 2021. Sementara itu, produksi padi pada tahun 2020 sebesar 54,42 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Jika di konversikan menjadi beras, produksi beras pada tahun 2020 mencapai sekitar 31,33 juta ton, atau meningkat sebesar 21,46 ribu ton (0,07 persen) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019. Tahun 2021 produksi padi mengalami penurunan yang sangat drastis. Produksi padi tahun 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras tahun 2021 mencapai 31,36 juta ton atau turun sebesar 140,73 ribu ton (0,45 persen) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun Indonesia jumlah produksi padinya mengalami naik turun.

Dinas Pertanian menyatakan Kabupaten Kepala merupakan sentra produksi padi yang tidak saja mampu memenuhi kebutuhan produksi setempat, tetapi juga menjadi salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Barat. Cirebon juga memasok kebutuhan beras ke wilayah lain di Provinsi Jawa Barat, bahkan memasok kebutuhan beras ke DKI Jakarta. (DKP, 2020) Banyak nya produksi padi di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mendukung pemenuhan pangan masyarakat khususnya di Cirebon. Akan tetapi banyaknya produksi padi di Kabupaten Cirebon tetapi masih adanya desa yang masuk dalam kategori desa rawan pangan dan masih ditemuinya kasus stunting di beberapa desa. Berdasarkan data dari Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, mengukur persoalan ketahanan pangan ini setidaknya menggunakan beberapa indikator yaitu: pertama, ketersediaan meliputi produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan, teknologi; kedua, akses dan distribusi pangan meliputi jalan produksi, gudang/lumbung pangan, tataniaga; ketiga, keanekaragaman/diversifikasi pangan; keempat, stabilitas harga pangan; kelima, mutu dan keanekaragaman pangan. Kabupaten Cirebon termasuk kategori Kabupaten yang memiliki kerentanan dalam kelima isu diatas yaitu belum memadainya ketersediaan gudang pangan, distribusi pangan ke masyarakat belum merata, ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan, semakin berkurangnya area lahan tanaman pangan karena tingginya kebutuhan dan resiko alih sebagai dampak kebutuhan akan perumahan fungsi lahan pengembangan industri.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait: 1) pengaruh produksi beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon; 2) pengaruh harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon; dan 3) pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan guna menganalisis:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan dengan sub tema ekonomi pedesaan dan ekonomi pesisir (ekonomi pertanian, badan usaha milik desa, teknologi pertanian) karena ada relevansinya dengan topik yang akan diteliti yaitu Analisis Pengaruh Produksi Beras dan Harga Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari kumpulan bahan atau data diperoleh pada instansi atau lembaga (seperti BPS, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bulog) tertentu untuk kemudian diolah secara sistematis dan objektif.

c. Jenis Masalah

Masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan sekian permasalahan yang ada, peneliti membatasi masalah tersebut pada analisis pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pengaruh produksi beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon?

- b. Bagaimana pengaruh harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah produksi beras dan harga beras berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh produksi beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon
- b. Untuk menganalisis pengaruh harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon
- c. Untuk menganalisis pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan

b. Kegunaan Praktis SYEKH NURJAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti khususnya bagi lembaga ketahanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat khususnya dalam ruang lingkup ekonomi terutama mengenai pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon

 b. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam bertambahnya karya ilmiah bidang ekonomi di Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa
- b. Untuk memberikan input dan tambahan informasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan

3. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan para peneliti ekonomi tentang pengaruh produksi beras dan harga beras terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 5 bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan. Secara garis besar, kerangka pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.
- BAB II Merupakan bab kajian/ acuan teoritik yang didalamnya akan diuraikan mengenai kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, hipotesis teoretik
- BAB III Pada bab ini akan dipaparkan tentang metodologi penelitian terdiri dari obyek penelitian, penentu populasi dan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, teknik analisis data, pengujian hipotesis statistik.
- BAB IV Bab analisis akan menjelaskan mengenai deskripsi data, persyaratan uji hipotesisi, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian.
- BAB V Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran